

BAB III

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN

JALAN DESA SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Penyelenggaraan prinsip akuntabilitas pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta tahun anggaran 2017 pada program pembangunan jalan desa Srimulyo menggunakan dasar analisis berupa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo, sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo, penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo serta laporan dana pembangunan jalan desa Srimulyo.

Peneliti dalam menganalisis akuntabilitas penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo berdasarkan indikator-indikator dalam penelitian yaitu keputusan penggunaan dana pembangunan jalan desa, penggunaan dana pembangunan jalan desa, sosialisasi dana pembangunan jalan desa dan laporan penggunaan dana pembangunan jalan desa dimana peneliti merujuk pada laporan APBDes terkait dengan indikator-indikator tersebut dengan merinci pendapatan asli desa, pendapatan dana transfer dan anggaran belanja barang dan jasa kemudian disusun laporan berdasarkan aspek atau prinsip akuntabilitas sehubungan dengan kinerja sumber daya manusia pemerintah desa terkait dengan pengalokasian dana pembangunan jalan desa Srimulyo.

A. Keputusan Pembangunan Jalan Desa Srimulyo

Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebagai indikator dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan

penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan jalan desa Srimulyo dalam menunjang keperluan industri pangan dan wisata serta menjawab keinginan masyarakat desa Srimulyo untuk segera dilakukan perbaikan jalan sebagai kebutuhan transportasi sehari-hari sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa Bapak Nurjayanto S.T dalam bentuk wawancara seperti yang ter kutip di bawah ini :

“Menurut saya, pemerintah desa Srimulyo dalam menyelenggarakan pembangunan jalan desa Srimulyo didasarkan pada dua alasan yakni kondisi jalan desa yang sudah tidak layak seperti batas jalan kurang aman karena langsung menghadap jurang pada badan kanan dan kiri jalan, pondasi jalan yang kurang kuat sehingga mudah rusak dan banyak jalan retak serta berlubang, jalan desa juga kurang lebar untuk sarana roda dua dan roda empat serta bagi pejalan kaki yang semakin meningkat jumlahnya tiap waktu. Hal ini menjadikan apresiasi bagi masyarakat desa Srimulyo untuk segera dilakukan pembangunan jalan desa melalui forum musyawarah antara masyarakat desa Srimulyo dengan para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati kepentingan pembangunan jalan desa tersebut”.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo didasarkan pada alasan yakni kondisi jalan desa yang sudah tidak layak seperti batas jalan kurang aman karena langsung menghadap jurang pada badan kanan dan kiri jalan, pondasi jalan yang kurang kuat sehingga mudah rusak dan banyak jalan retak serta berlubang, jalan desa juga kurang lebar untuk sarana roda dua dan roda empat serta bagi pejalan kaki yang semakin meningkat jumlahnya tiap waktu. Hal ini menjadi suatu apresiasi bagi masyarakat desa Srimulyo untuk segera dilakukan pembangunan jalan desa melalui forum musyawarah antara masyarakat desa Srimulyo.

Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh Kepala Desa sebagai indikator dalam penelitian ini juga dianalisis berdasarkan penggunaan pembangunan dari jalan terkait fungsinya sebagai desa wisata sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa Bapak Nurjayanto S.T dan Bayu selaku masyarakat desa Srimulyo dalam bentuk wawancara seperti yang ter kutip di bawah ini :

“Alasan berikutnya adalah pembangunan jalan ini harus mendukung keberadaan desa Srimulyo sebagai desa industri pangan dan wisata seperti yang diapresiasi oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo yakni pembangunan jalan desa yang berkualitas dalam konstruksinya seperti penguatan pondasi jalan, pelebaran jalan yang maksimal serta pembangunan pengamanan sekitar area jalan desa.”

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo disesuaikan dengan keputusan pembangunan jalan desa dalam menunjang keperluan industri pangan dan wisata. Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh Kepala Desa sebagai indikator dalam penelitian ini juga dianalisis berdasarkan pengadaan struktur anggaran pembangunan jalan desa dalam menunjang kelangsungan tujuan pembangunan jalan desa Srimulyo tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa Bapak Nurjayanto S.T dalam bentuk wawancara seperti yang ter kutip di bawah ini :

“Proses pembuatan jalan Srimulyo dilaksanakan dengan sistem swakelola yakni berupa gotong royong yang diselenggarakan tiap hari minggu atau lembur pada malam hari di luar hari minggu dengan mengikutsertakan para warga desa Srimulyo secara keseluruhan hingga selesai. Hal ini memerlukan pengadaan struktur anggaran pembangunan jalan desa dalam menunjang kelangsungan tujuan pembangunan jalan desa

Srimulyo tersebut, sehingga pemerintah desa Srimulyo harus benar-benar cermat dalam menetapkan anggaran terkait dengan operasionalnya.”

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo memerlukan pengadaan struktur anggaran pembangunan jalan desa dalam menunjang kelangsungan tujuan pembangunan jalan desa Srimulyo tersebut, sehingga pemerintah desa Srimulyo harus benar-benar cermat dalam menetapkan anggaran terkait dengan operasionalnya.

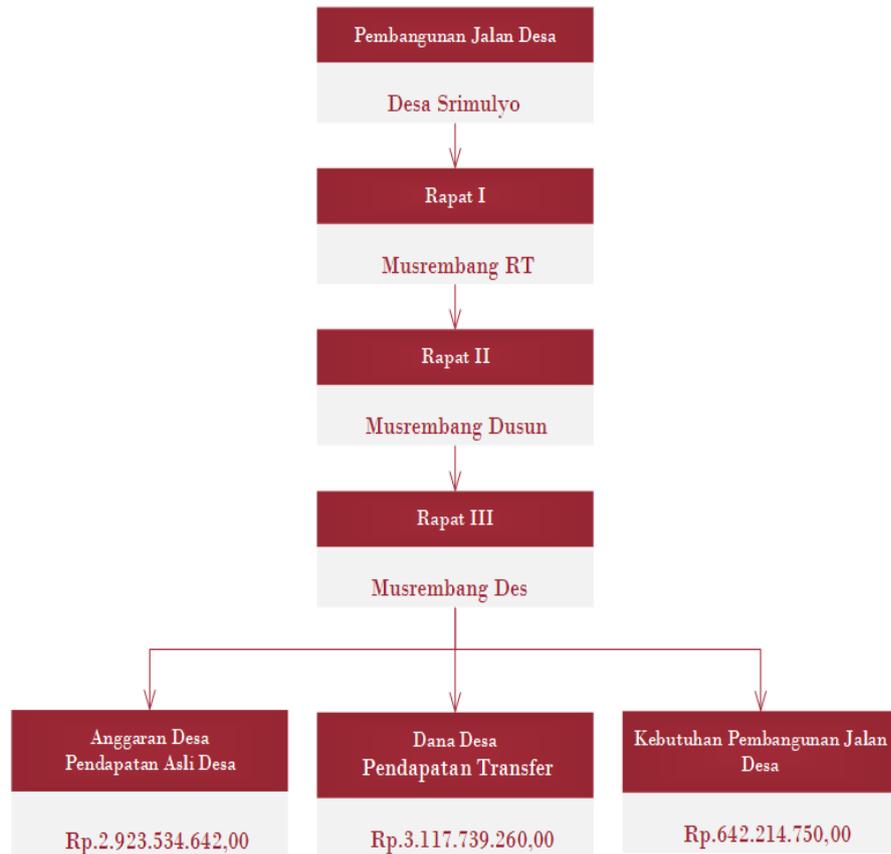
Kemudian wawancara juga dilakukan bersama masyarakat desa Srimulyo yang ikut langsung memberikan saran dalam pembangunan jalan desa. Pembangunan jalan desa menjadi sorotan utama bagi masyarakat desa dikarenakan kondisi jalan yang memang sudah tidak memadai atau sudah tidak layak. Jalanan yang sudah berlubang, tidak ada pembatas jalan dan desa Srimulyo hampir setiap tahunnya mengalami longsor yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas di desa. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh masyarakat desa dalam bentuk wawancara seperti yang ter kutip di bawah ini :

“Keputusan pembangunan jalan desa sudah menjadi kesepakatan bersama yaitu mengutamakan pembangunan jalan desa. Jalan desa yang sudah tidak layak memberikan rasa yang tidak aman untuk beraktivitas, saya sendiri merasa tidak nyaman melewati jalan desa terutama saat hujan mengguyur desa. Rasa was-was selalu menyertai setiap perjalanan. Pembangunan jalan desa juga mengacu pada apresiasi bapak Presiden Jokowi yang menginginkan desa Srimulyo menjadi desa Industri Terpadu dalam bidang pangan maupun wisata.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama masyarakat desa, masyarakat desa sangat setuju dan memang keputusan pembangunan jalan desa tidak semena-mena di putuskan oleh sepihak saja tetapi keputusan pembangunan jalan desa memang hasil dari keputusan bersama antara pemerintah dengan masyarakat desa. Pembangunan jalan desa juga merupakan kebutuhan utama dalam beraktivitas sehari-hari. Maka dari itu masyarakat desa juga ikut memberikan andil mengingat pembangunan jalan desa juga menyepakati keputusan untuk mengelola atau membangun jalan desa dengan cara swakelola atau dilakukan sendiri oleh masyarakat desa. Pemerintah desa akan mengawasi pembangunan jalan desa yang dilaksanakan oleh masyarakat desa.

Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo telah menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang disesuaikan dengan keputusan pembangunan jalan desa dalam menunjang kelangsungan pembangunan jalan desa untuk keperluan industri pangan dan wisata di desa Srimulyo selain juga menjawab keinginan masyarakat desa Srimulyo untuk segera dilakukan perbaikan jalan dalam memenuhi kebutuhan transportasi mereka sehari-hari dengan menggunakan prinsip swakelola yakni sistem gotong royong oleh seluruh warga masyarakat desa Srimulyo. Secara garis besar, keputusan pemerintah desa Srimulyo dalam pengalokasian sumber dana untuk pembangunan desa yang direalisasikan

pada penganggaran pembangunan jalan desa Srimulyo secara terperinci terpapar dalam bagan dibawah ini:

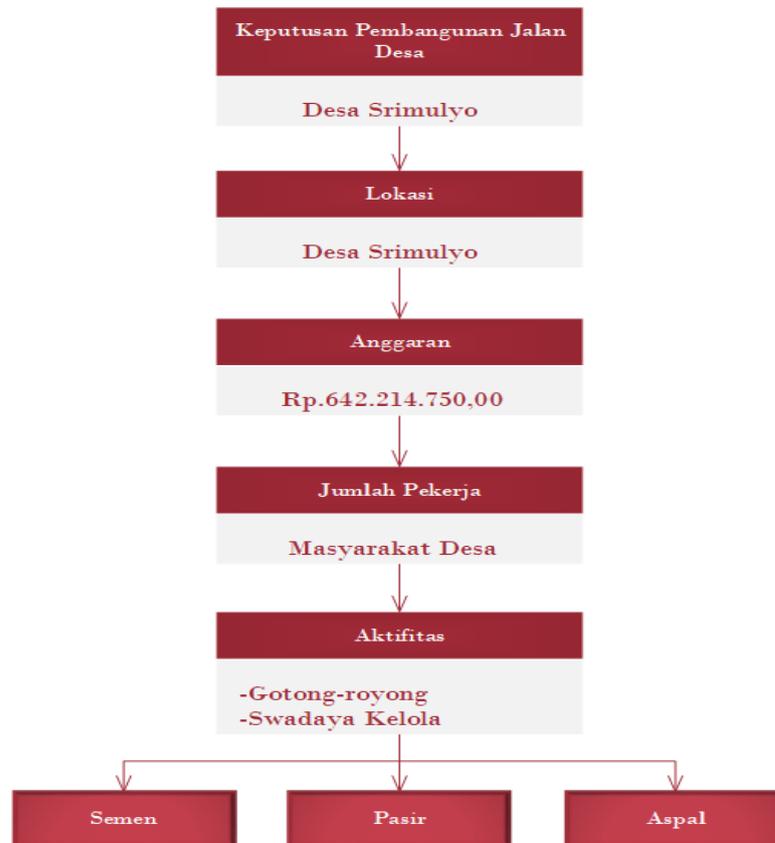


Gambar 3.1 Keputusan Pembangunan Jalan Desa Srimulyo
Sumber : Kumpulan Data Kantor Desa Srimulyo

Berdasarkan bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh Kepala Desa berdasarkan penggunaan anggaran dana berupa pendapatan asli desa sebesar Rp. 2.923.534.642,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 3.117.739.260,00 yang kemudian diadakan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat RT, dusun dan desa sehingga menghasilkan anggaran untuk pembangunan jalan desa Srimulyo sebesar Rp. 642.214.750,00 dimana anggaran tersebut

selanjutnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan jalan desa Srimulyo yang menunjang keperluan industri pangan dan wisata serta digunakan dalam perbaikan jalan sebagai kebutuhan transportasi sehari-hari.

Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Srimulyo memutuskan untuk membangun jalan desa melalui proses penerapan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang disesuaikan dengan keputusan pembangunan jalan desa melalui penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan jalan desa Srimulyo dalam menunjang keperluan industri pangan dan wisata Sedangkan pemerintah desa Srimulyo dalam membuat keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan jalan desa juga memperhatikan lokasi, anggaran dan jumlah pekerja yang secara garis besar terperinci dalam bagan dibawah ini :



Gambar 3.2 Dasar Keputusan Pembangunan Jalan Desa Srimulyo
Sumber : Kumpulan Data Kantor Desa Srimulyo

Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Srimulyo dalam menyelenggarakan pembangunan jalan desa Srimulyo juga harus memutuskan lokasi pembangunan yakni di jalan utama desa Srimulyo dengan anggaran yang sudah disepakati bersama berdasarkan musrembang di tingkat RT, dusun dan desa sebesar Rp. 642.214.750,00 yang dikerjakan oleh seluruh masyarakat desa Srimulyo melalui gotong royong dan pengadaan kerja swadaya kelola untuk pengerjaan bahan dasar semen, pasir dan aspal yang digunakan dalam pembuatan pondasi jalan dan pembatas

jalan di sepanjang jalan utama desa Srimulyo untuk keperluan industri, wisata dan keamanan transportasi masyarakat.

Di satu sisi, keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo tersebut juga mendasarkan pada alasan yakni kondisi jalan desa yang sudah tidak layak seperti batas jalan kurang aman karena langsung menghadap jurang pada badan kanan dan kiri jalan, pondasi jalan yang kurang kuat sehingga mudah rusak dan banyak jalan retak serta berlubang, jalan desa juga kurang lebar untuk sarana roda dua dan roda empat serta bagi pejalan kaki yang semakin meningkat jumlahnya tiap waktu.

B. Sosialisasi Pembangunan Jalan Desa Srimulyo

Pada indikator sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo, dianalisa berdasarkan proses penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa pada periode 2017 melalui upaya sosialisasi pada masyarakat desa Srimulyo terkait dengan dana yang diserahkan oleh pemerintah desa Srimulyo melalui APBDes diserahkan pada Tim Pengelola Kegiatan yang berasal dari perangkat desa Srimulyo dan diketuai oleh Bapak Supriyanto selaku dukuh setempat berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto S.T yang dijabarkan sebagai berikut:

“Pemerintah desa Srimulyo dalam menyelenggarakan pembangunan jalan desa Srimulyo harus melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat desa Srimulyo dalam upaya memberikan pemahaman tentang tujuan rencana pemerintah desa Srimulyo dalam membangun jalan desa Srimulyo yakni untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi di jalan utama desa demi kepentingan keselamatan para pengguna jalan serta menunjang unsur industri sebagaimana yang diapresiasi oleh pemerintah pusat.”

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo terlebih dahulu pada masyarakat desa Srimulyo tentang tujuan rencana pemerintah desa Srimulyo dalam membangun jalan desa Srimulyo yakni untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi di jalan utama desa demi kepentingan keselamatan para pengguna jalan serta menunjang unsur industri sebagaimana yang diapresiasi oleh pemerintah pusat. Sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo terkait dengan dana yang diserahkan oleh pemerintah desa Srimulyo dalam rangka merealisasikan pembangunan jalan desa berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto S.T yang dijabarkan sebagai berikut:

“Sosialisasi pada masyarakat desa Srimulyo juga upaya dari pemerintah desa Srimulyo dalam membahas Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBDes) sekaligus sebagai proses penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa pada periode 2017 dalam merealisasikan pembangunan jalan desa Srimulyo tersebut melalui diskusi tentang kebutuhan besaran biaya untuk kepentingan material dan jasa pada masyarakat desa Srimulyo sekaligus membahas tentang proses penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo dimana dalam diskusi tersebut diputuskan bahwa dana yang diserahkan oleh pemerintah desa Srimulyo melalui APBDes diserahkan pada Tim Pengelola Kegiatan yang berasal dari perangkat desa Srimulyo dan diketuai oleh Bapak Supriyanto selaku dukuh.”

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo pada masyarakat desa Srimulyo memiliki tujuan untuk membahas Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBDes) sekaligus sebagai proses penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa pada periode 2017 dalam merealisasikan pembangunan jalan

desa Srimulyo tersebut melalui diskusi tentang kebutuhan besaran biaya untuk kepentingan material dan jasa pada masyarakat desa Srimulyo sekaligus membahas tentang proses penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo dimana dalam diskusi tersebut diputuskan bahwa dana yang diserahkan oleh pemerintah desa Srimulyo melalui APBDes diserahkan pada Tim Pengelola Kegiatan yang berasal dari perangkat desa Srimulyo.

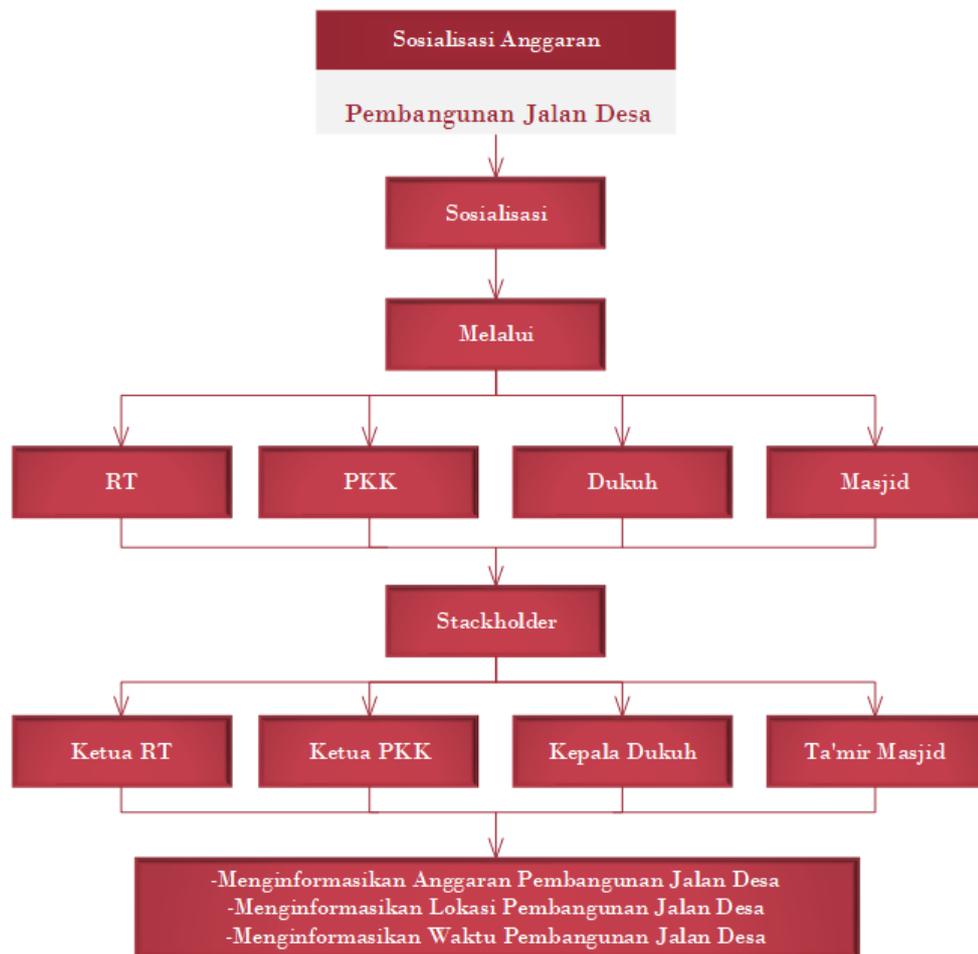
Kemudian wawancara juga dilakukan bersama masyarakat desa Srimulyo yang ikut juga mensosialisasikan pembangunan jalan desa Srimulyo. Masyarakat yang telah mengetahui dulu tentang pembangunan jalan desa juga ikut membagikan informasi melalui mulut ke mulut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh masyarakat desa dalam bentuk wawancara seperti yang terketip di bawah ini :

“Saya sendiri sebagai salah satu anggota pemuda desa (Sri) ikut mensosialisasikan terkait pembangunan jalan desa Srimulyo. Itu kabar baik bagi masyarakat maka sudah sepantasnya mereka tahu tentang keputusan pembangunan jalan desa. Pembangunan jalan desa pun sudah menjadi keinginan yang sudah lama diinginkan oleh masyarakat desa Srimulyo.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat terkait dengan sosialisasi pembangunan jalan desa telah ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi seputar pembangunan desa. Dalam memberikan informasi, masyarakat juga harus tahu berapa anggaran yang akan dikeluarkan dalam pembangunan jalan desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan jalan desa cukup besar anggarannya. Dengan anggaran dari dana desa yang cukup besar, diharapkan jalan desa Srimulyo menjadi layak digunakan untuk beraktivitas terutama masyarakat desa Srimulyo itu sendiri.

Sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo pada masyarakat desa Srimulyo telah menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah proses penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa pada periode 2017 dimana proses tersebut melalui upaya sosialisasi pada masyarakat desa Srimulyo untuk diikutsertakan juga dalam menentukan besaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan jalan desa Srimulyo di mana besaran biaya tersebut berdasarkan kebutuhan material barang dan jasa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo.

Proses penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo dimana dalam sosialisasi tersebut juga diputuskan bahwa dana yang diserahkan oleh pemerintah desa Srimulyo melalui APBDes diserahkan pada Tim Pengelola Kegiatan yang berasal dari perangkat desa Srimulyo dan diketuai oleh Bapak Supriyanto selaku dukuh setempat. Selanjutnya pemerintah desa Srimulyo dalam mensosialisasikan anggaran untuk keperluan desa Srimulyo juga melibatkan beberapa pihak terkait dengan kegiatan operasional yang mendukung pembangunan jalan desa Srimulyo seperti yang terperinci dalam bagan dibawah ini :



Gambar 3.3 Sosialisasi Anggaran Pendanaan

Sumber : Kumpulan Data Kantor Desa Srimulyo

Berdasarkan bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi anggaran untuk pembangunan jalan desa Srimulyo diselenggarakan melalui rapat RT, PKK, Dukuh dan pengurus masjid dalam rangka memberdayakan anggaran melalui pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginformasikan anggaran, lokasi dan waktu pembangunan jalan desa Srimulyo pada masyarakat desa Srimulyo yakni melalui ketua RT, ketua PKK, Kepala Dukuh dan Ta'mir masjid sehingga dengan proses sosialisasi tersebut diharapkan dapat merealisasikan sumber dana atau anggaran secara efektif.

C. Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Desa Srimulyo

Indikator penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo dianalisa berdasarkan administrasi terkait dengan pelaksanaan pembelian barang yakni material atau bahan bangunan jalan desa serta pembelian jasa yakni sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan jalan desa yang diputuskan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Srimulyo yang selanjutnya disampaikan oleh sekretaris desa Bapak Nurjayanto S.T dalam bentuk wawancara sebagai berikut:

“Berdasarkan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Srimulyo sebelumnya, penyelenggaraan pembangunan jalan desa Srimulyo harus mempertimbangkan keputusan dalam penggunaan dana pembangunan jalan desa. Seperti yang diketahui bahwa dana pembangunan jalan desa berasal dari dana Anggaran Belanja Desa pemerintah pusat Republik Indonesia 2016 melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang kemudian dialokasikan ke pemerintah kabupaten Bantul melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya dialokasikan pada pemerintah desa melalui kepala urusan tata usaha dan umum desa Srimulyo melalui Rekening Kas Desa (RKD).”

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo berdasarkan pada rapat koordinasi dengan mempertimbangkan dana pembangunan jalan desa yang berasal dari dana Anggaran Belanja Desa pemerintah pusat Republik Indonesia 2016 melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang kemudian dialokasikan ke pemerintah kabupaten Bantul melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya dialokasikan pada pemerintah desa melalui kepala urusan tata usaha dan umum desa Srimulyo melalui Rekening Kas Desa (RKD). Penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo terkait dengan pelaksanaan pembelian barang diputuskan

melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Srimulyo sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa Bapak Nurjayanto S.T dalam bentuk wawancara sebagai berikut:

“Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi di jalan utama desa demi kepentingan keselamatan para pengguna jalan serta menunjang unsur industri sebagaimana yang diapresiasi oleh pemerintah pusat. Kemudian besaran dana tersebut disosialisasikan pada masyarakat desa Srimulyo melalui diskusi tentang kebutuhan besaran biaya untuk kepentingan material dan jasa pada pembangunan jalan desa Srimulyo.”

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo dialokasikan pada sarana dan prasarana transportasi di jalan utama desa demi kepentingan keselamatan para pengguna jalan dengan merealisasikan besaran biaya untuk kepentingan pembelanjaan material dan jasa. Penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo terkait dengan pelaksanaan pembelian barang dilakukan penyesuaian besaran dana antara besaran dana bantuan dana dari pemerintah pusat dengan besaran dana yang ditetapkan oleh masyarakat desa Srimulyo sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa Bapak Nurjayanto S.T dalam bentuk wawancara sebagai berikut:

“Besaran biaya untuk kepentingan material dan jasa pada pembangunan jalan desa Srimulyo selanjutnya dilakukan penyesuaian tentang besaran dana yang dibutuhkan tersebut antara besaran dana bantuan dana dari pemerintah pusat dengan besaran dana yang ditetapkan oleh masyarakat desa Srimulyo untuk kebutuhan belanja barang terkait dengan dana material pembangunan jalan desa Srimulyo dan dana keperluan rapat serta kebutuhan belanja jasa terkait dengan sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan jalan desa Srimulyo yakni jasa proyek seperti tukang dan pelaksana pembangunan yang lain berdasarkan hasil diskusi para masyarakat desa Srimulyo yang dilanjutkan dengan penyusunan laporan

keuangan tentang anggaran pembangunan jalan desa Srimulyo tahun 2017 oleh sekretaris desa Srimulyo yang disahkan oleh tata usaha dan umum desa Srimulyo.”

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo telah dilakukan penyesuaian tentang besaran dana yang dibutuhkan tersebut antara besaran dana bantuan dana dari pemerintah pusat dengan besaran dana yang ditetapkan oleh masyarakat desa Srimulyo untuk kebutuhan belanja barang terkait dengan dana material pembangunan jalan desa Srimulyo dan dana keperluan rapat serta kebutuhan belanja jasa yang selanjutnya dilakukan penyusunan laporan keuangan tentang anggaran pembangunan jalan desa Srimulyo tahun 2017.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana pembangunan jalan desa telah menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah administrasi pelaksanaan pembelian barang yakni material atau bahan bangunan jalan desa serta pembelian jasa yakni sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan jalan desa.

Kemudian wawancara juga dilakukan bersama masyarakat desa Srimulyo yang ikut langsung memberikan saran dalam pembangunan jalan desa. Dalam penggunaan dana pembangunan jalan desa, masyarakat juga ikut memberikan masukan dan saran besaran biaya yang akan digunakan dalam pembangunan jalan desa. Penggunaan dananya pun sebatas diketahui melalui APBDes yang bisa akses melalui kantor desa maupun website desa Srimulyo.

APBDes desa Srimulyo yang telah dibuat oleh kantor desa sudah sangat terperinci baik pembelanjaan fisik atau non fisik. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh masyarakat desa dalam bentuk wawancara seperti yang ter kutip di bawah ini :

“Masyarakat desa Srimulyo pun bisa dengan mudah mengetahui apa saja yang akan dibeli untuk pembangunan jalan desa. Berapa besar anggaran yang akan dikeluarkan. Saya sendiri sudah mencoba secara langsung meminta data tentang penggunaan dana pembanguna jalan desa. Pihak kantor desa pun dengan cekatan memberikan data berupa APBDes. Dalam APBDes telah di tulis sampai pasir, semen dan lain-lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Srimulyo dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa dengan mudah mengetahui apa saja yang akan digunakan dalam pembangunan jalan desa maupun anggaran yang akan dikeluarkan untuk pembelian barang dan jasa. APBDes desa Srimulyo juga telah merincikan anggaran baik fisik maupun non fisik dalam penggunaan dana pembangunan jalan desa. Dengan cara itu masyarakat juga bisa ikut mengawasi pengeluaran dan pemasukkan desa Srimulyo.

Keputusan pengadministrasian pelaksanaan pembelian barang dan jasa tersebut didasarkan pada rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Srimulyo dimana dana pembangunan jalan desa tersebut diketahui berasal dari dana Anggaran Belanja Desa pemerintah pusat Republik Indonesia 2016 melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang kemudian dialokasikan ke pemerintah kabupaten Bantul melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya dialokasikan pada pemerintah desa melalui kepala urusan tata usaha dan umum desa Srimulyo melalui Rekening

Kas Desa (RKD). Besaran dana tersebut diketahui digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi sebagai kepentingan keselamatan para pengguna jalan serta menunjang unsur industri sebagaimana yang diapresiasi oleh pemerintah pusat. Besaran dana tersebut disosialisasikan pada masyarakat desa Srimulyo sebagai dana belanja barang yakni berupa material pembangunan jalan desa Srimulyo dan dana belanja jasa yakni sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan jalan desa Srimulyo yang selanjutnya dilakukan penyusunan laporan keuangan tentang anggaran pembangunan jalan desa Srimulyo tahun 2017 oleh sekretaris desa Srimulyo yang disahkan oleh tata usaha dan umum desa Srimulyo.

Penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo berdasarkan administrasi terkait dengan pelaksanaan pembelian barang dan jasa berdasarkan pemakaian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang diputuskan melalui rapat koordinasi seperti yang terperinci di bawah ini :



Gambar 3.4 Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Desa Srimulyo
Sumber : Kumpulan Data Kantor Desa Srimulyo

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan desa Srimulyo menggunakan anggaran pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 19.883.650,00 dimana besaran biaya tersebut digunakan untuk pembelanjaan alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat serta belanja honorarium tim panitia yang meliputi anggaran belanja ketua, sekretaris, anggota dan tenaga perencana.

Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp. 622.331.100,00 meliputi anggaran yang diperlukan oleh pemerintah desa Srimulyo dalam rangka keperluan pembiayaan pekerjaan cor blok kabregan, cor blok payak tengah, cor blok sandeyan, cor blok jolosutro, cor blok ngelosari, cor blok bintaran kulon dan cor blok pesedan dimana semua pengerjaan pengecoran tersebut memerlukan biaya untuk pengadaan material seperti pasir, split, semen, pekerja dan tukang batu. Pemerintah desa Srimulyo dalam melaksanakan pembangunan jalan desa berdasarkan pada anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam rangka membiayai pekerjaan non fisik berupa belanja jasa yakni pembayaran gaji bagi tenaga ahli yang terlibat dalam proses pengerjaan pembangunan jalan desa seperti ahli cor, desain pembatas jalan dan pemondasian dimana dalam melaksanakan pengerjaan pembangunan jalan desa tersebut dilakukan secara gotong royong bersama seluruh masyarakat desa Srimulyo.

Sedangkan pembiayaan untuk pengerjaan fisik meliputi pembiayaan belanja barang dan modal yang meliputi belanja alat tulis kantor, makanan dan

minuman rapat, honorarium tim panitia serta seluruh bahan material untuk pekerjaan pengecoran.

D. Laporan Dana Pembangunan Jalan Desa Srimulyo

Pada indikator laporan dana pembangunan jalan desa Srimulyo dianalisa berdasarkan monitoring kinerja tim pengalokasian dana berupa penyerahan dana APBDes untuk pembangunan jalan desa Srimulyo pada beberapa pelaksana pembangunan jalan desa Srimulyo untuk keperluan operasional barang dan jasa sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa dalam wawancara berikut :

“Pemerintah desa Srimulyo dalam membuat rincian laporan dana pembangunan jalan desa Srimulyo disusun dalam bentuk laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan sistem akuntansi keuangan pemerintah, dalam penyusunannya kami menggunakan contoh pelaporan APBDes yang sudah-sudah. Prinsip kami dalam menyusun APBDes tersebut adalah membuahkan pemahaman bagi para pejabat desa akan adanya besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan desa Srimulyo dimana dalam penyusunan laporan APBDes tersebut tercantumkan tentang besaran dana asal dari pemerintah pusat hingga sampai pada pemerintah desa. Pada laporan APBDes tersebut juga tertuang tentang pendapatan asli desa Srimulyo, pendapatan transfer yang kemudian dijabarkan dalam rincian besaran biaya belanja barang dan jasa secara keseluruhan yang dibutuhkan dalam pembangunan fisik maupun non fisik desa Srimulyo.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Srimulyo dalam pelaporan dana pembangunan jalan desa Srimulyo dimulai dengan menyusun laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang mendasarkan pada sistem akuntansi keuangan pemerintah dimana dalam proses penyusunannya menggunakan pelaporan APBDes yang sudah-sudah. Di satu sisi, pemerintah desa Srimulyo dalam menyusun APBDes tersebut berharap dapat menghasilkan pemahaman bagi

para pejabat desa akan adanya besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan desa Srimulyo dimana dalam penyusunan laporan APBDes tersebut tercantumkan tentang besaran dana asal dari pemerintah pusat hingga sampai pada pemerintah desa. Pada laporan APBDes tersebut juga tertuang tentang pendapatan asli desa Srimulyo, pendapatan transfer yang kemudian dijabarkan dalam rincian besaran biaya belanja barang dan jasa secara keseluruhan.

Pemerintah desa Srimulyo dalam mengevaluasi rincian laporan dana pembangunan jalan desa Srimulyo mengaku bahwa dalam pemantauan secara rinci mengenai besaran biaya yang dikeluarkan untuk pembelanjaan barang dan jasa membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan mengingat pembangunan jalan yang harus lebar dan panjang serta kuat mengingat pembangunan jalan tersebut harus mendukung aspek industri sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa dalam wawancara berikut :

“Namun hingga sekarang, kami masih belum bisa melakukan pemantauan secara rinci mengenai besaran biaya yang dikeluarkan untuk pembelanjaan barang dan jasa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo hingga pembangunan jalan desa Srimulyo saat ini sampai pada pembangunan konstruksi penguatan pondasi jalan desa yang diperkirakan membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan mengingat pembangunan jalan yang harus lebar dan panjang serta kuat mengingat pembangunan jalan tersebut harus mendukung aspek industri. Kami masih kesulitan dalam memonitor pelaksanaan pengeluaran anggaran secara rinci dikarenakan jumlah tim penanggung jawab operasional pembiayaan dana pembangunan yang masih kurang, ditunjang dengan kemampuan akuntansi kami yang masih harus ditingkatkan dalam proses penghitungan kasar hingga akumulasi dana total tiap pelaksanaan pembiayaan barang dan jasa.”

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Nurjayanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan dana pembangunan jalan desa

Srimulyo yang dilakukan oleh pemerintah desa masih mengalami kesulitan dalam memonitor pelaksanaan pengeluaran anggaran secara rinci yang dikarenakan jumlah tim penanggung jawab operasional pembiayaan dana pembangunan yang masih kurang kemudian ditunjang dengan kemampuan akuntansi kami yang masih harus ditingkatkan dalam proses penghitungan kasar hingga akumulasi dana total tiap pelaksanaan pembiayaan barang dan jasa.

Kemudian wawancara juga dilakukan bersama masyarakat desa Srimulyo yang ikut langsung memberikan saran dalam pembangunan jalan desa. Dalam penyusunan laporan dana pembangunan jalan desa, masyarakat tidak begitu paham dan sebagian masyarakat tidak tahu tentang apa saja yang dilakukan untuk penyusunan laporan pembangunan jalan desa. Rincian yang ada di APBDes sudah sangat lengkap dan terperinci, baik penggunaan fisik atau non fisik. APBDes desa Srimulyo pun telah di sahkan pada akhir tahun 2016. Namun pada kenyataannya pembangunan jalan desa masih lambat dan malah terlihat tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh masyarakat desa dalam bentuk wawancara seperti yang ter kutip di bawah ini :

“Ketika saya membaca APBDes yang telah di sahkan pada akhir tahun 2016, sudah sangat terperinci berapa saja anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan jalan desa. Dengan data yang sudah sangat jelas itu pada kenyataannya pembangunan jalan desa belum terlihat sepenuhnya berjalan bahkan sebagian besar jalan desa Srimulyo masih dikatakan tidak layak mengingat alasan mengapa kami menjadikan pembangunan jalan desa adalah keinginan utama itu dikarenakan jalan masih banyak yang berlubang dan masih besar berpotensi longsor. Keadaan itu menjadi kekhawatiran masyarakat desa Srimulyo.”

Dari wawancara yang dilakukan bersama warga masyarakat desa Srimulyo dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya tindakan lapangan atau hasil lapangan dalam pembangunan jalan desa. Semua itu dapat dilihat dari masih banyaknya jalan yang berlubang dan kondisi jalan yang rawan bencana alam seperti longsor. Pembangunan jalan desa tidak hanya dirincikan di dalam APBDes tetapi juga melalui pembangunan secara nyata yang terjadi dilapangan harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa.



Gambar 3.5 Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Desa Srimulyo
Sumber : Kumpulan Data Kantor Desa Srimulyo

Hal ini berarti bahwa pemerintah desa Srimulyo belum bisa melakukan pemantauan secara rinci mengenai besaran biaya yang dikeluarkan untuk pembelanjaan barang dan jasa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo hingga pembangunan jalan desa Srimulyo yang dikerjakan saat ini berupa pembangunan konstruksi penguatan pondasi jalan desa. Pemerintah desa Srimulyo mengaku mengalami kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan pengeluaran anggaran secara rinci yang dikarenakan jumlah tim penanggung jawab operasional pembiayaan dana pembangunan masih kurang dan ditunjang dengan kemampuan akuntansi yang belum memadai dalam proses

penghitungan kasar hingga akumulasi dana total dari tiap pelaksanaan pembiayaan barang dan jasa. Terkait dengan beberapa uraian dari indikator-indikator di atas, pembangunan jalan desa Srimulyo menggunakan dana pendapatan belanja desa tahun 2017 dalam rangka merealisasikan keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo serta penggunaan dana pembangunan jalan desa dalam bentuk rincian APBDes yang mencakup anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Desa Srimulyo Pada Aspek (Belanja Barang dan Jasa) Pembangunan Jalan Desa Pada Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 19.883.650,00
a. Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 442.650,00
b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.000.000,00
c. Belanja Honorarium Tim Panitia	Rp. 18.441.000,00

Sumber : Kumpulan Data Kantor Desa Srimulyo

Tabel 3.2 Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Desa Srimulyo Pada Aspek (Belanja Modal) Pembangunan Jalan Desa Pada Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran
<u>Belanja Modal</u>	Rp. 622.331.100,00
a. Pengadaan Jalan Desa	Rp. 622.331.100,00

Sumber : Kumpulan Data Kantor Desa Srimulyo

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Srimulyo diketahui mengeluarkan anggaran total untuk pembangunan jalan desa Srimulyo sebesar Rp. 642.214.750,00 dengan perincian pengeluaran

biaya belanja barang dan jasa sebesar Rp. 19.883.650,00 dimana biaya tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 422.650,00, biaya belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 1.000.000,00 dan biaya honorarium sebesar Rp. 18.461.000,00. Sedangkan pemerintah desa Srimulyo diketahui juga mengeluarkan biaya untuk belanja modal yakni belanja modal pengadaan jalan desa sebesar Rp. 622.331.100,00.

Berdasarkan rincian dana tersebut, dapat disimpulkan bahwa besaran dana yang diperlukan untuk program pembangunan jalan desa Srimulyo tergolong dalam kisaran dana yang terbesar dari semua program pelaksanaan pembangunan desa dimana pemerintah desa Srimulyo selain mengeluarkan anggaran untuk program pembangunan jalan desa juga harus menganggarkan program lain dalam menunjang bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti program rehabilitasi gedung kantor desa, pembangunan jembatan desa, pembangunan talut desa, pembangunan saluran air, pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan desa, pembangunan bangunan pendukung wisata desa, rehabilitasi atau pemeliharaan tempat ibadah, pembangunan kawasan kuliner desa dan kegiatan bidang pembangunan yang lain. Program pembangunan jalan desa membutuhkan anggaran atau dana terbesar karena dana tersebut diharuskan untuk membuat jalan desa yang mendukung unsur pengadaan industri di desa Srimulyo seperti yang diapresiasi oleh pemerintah pusat sebelumnya.

Sehubungan dengan uraian beberapa pelaksanaan dari indikator penelitian tersebut, penelitian tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas

penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan studi kasus pembangunan jalan Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2017 di kantor desa Srimulyo menggunakan metode wawancara dengan sekretaris desa Srimulyo yakni Bapak Nurjayanto S.T.

Wawancara tersebut dilaksanakan terkait dengan keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo melalui APBDes oleh pemerintah desa, sosialisasi tentang pembangunan dan penggunaan dana jalan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat serta tentang rincian laporan penggunaan dana pembangunan jalan desa dengan mendasarkan analisa mengenai pendapatan desa Srimulyo yang terdiri dari pendapatan asli, pendapatan transfer, serta dana belanja desa yang mana semua jenis dana tersebut digunakan dalam pembangunan desa pada periode 2017.

Peneliti selain menggunakan instrument penelitian berupa teknik wawancara juga melakukan pengambilan data berupa Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBDes) pada periode 2017 pada aspek pembangunan jalan desa Srimulyo yang disusun oleh sekretaris desa. APBDes yang digunakan oleh desa Srimulyo berupa anggaran pembangunan desa dimana desa Srimulyo tersebut diketahui mendapatkan apresiasi dari presiden RI Bapak Joko Widodo pada bulan agustus 2017 dimana desa Srimulyo dikehendaki menjadi desa industri pangan dan wisata sehingga Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBDes) yang telah disusun sebelumnya oleh sekretaris desa

tersebut dilakukan perincian terkait dengan belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat serta honorarium tim panitia.

Apresiasi dari presiden RI Bapak Joko Widodo pada bulan agustus 2017 dimana desa Srimulyo dikehendaki menjadi desa industri pangan dan wisata tersebut akan mempengaruhi Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBDes) Srimulyo pada aspek belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, honorarium tim panitia serta program pengadaan jalan desa. Anggaran tersebut harus menunjang operasional program industri desa yang telah dicanangkan oleh pemerintah meliputi peningkatan kualitas pondasi jalan, pelebaran jalan, pembangunan jalan yang memenuhi unsur pariwisata dan penunjang keamanan jalan desa dimana semua hal tersebut membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi terkait dengan penggunaan material pembangunan jalan yang berkualitas dan pemakaian sumber daya manusia yang mumpuni dalam rangka menunjang tujuan pembangunan jalan desa Srimulyo sebagai desa industri.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti dalam menganalisa akuntabilitas penggunaan dana desa Srimulyo pada studi kasus penggunaan dana pembangunan jalan desa tahun 2017 menggunakan beberapa prinsip akuntabilitas yang berhubungan erat dengan indikator-indikator penelitian ini yakni indikator keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo yang diukur dengan pengadaan struktur anggaran pembangunan jalan desa dalam menunjang kelangsungan pembangunan jalan desa Srimulyo. Indikator

selanjutnya yaitu sosialisasi pembangunan jalan desa yang dapat diukur dengan proses penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa pada periode 2017.

Pada indikator penggunaan dana pembangunan jalan desa yang berasal dari dana anggaran belanja desa pemerintah pusat Republik Indonesia 2016 yang dialokasikan ke pemerintah kabupaten Bantul kemudian dialokasikan pada pemerintah desa melalui kepala urusan tata usaha dan umum desa Srimulyo melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten Bantul melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya diberikan kepada pemerintah desa melalui Rekening Kas Desa (RKD) dapat diukur melalui administrasi pelaksanaan berupa pembelian barang yakni material atau bahan bangunan jalan desa serta pembelian jasa yakni sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan jalan desa. Sedangkan pada indikator laporan dana pembangunan jalan desa diukur dengan monitoring kinerja tim pengalokasian dana yakni penyerahan dana APBDes untuk pembangunan jalan desa Srimulyo pada beberapa pelaksana pembangunan jalan desa Srimulyo untuk keperluan operasional barang dan jasa.

Beberapa indikator di atas sebagai tolak ukur atau indikator dalam merealisasikan prinsip akuntabilitas dimana akuntabilitas dana desa adalah penyelenggaraan pemerintahan maupun perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk akuntabilitas dimana di dalamnya terkandung suatu kewajiban untuk

menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Srimulyo karena memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan dalam rangka bertanya atau menggugat pertanggungjawaban oleh para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik tingkat program, daerah hingga masyarakat terkait dengan semua kegiatan yang membutuhkan pengelolaan alokasi dana desa yang kemudian diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat desa Srimulyo.

Realisasi akuntabilitas pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srimulyo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan di desa Srimulyo untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat terutama pembangunan Jalan Desa Srimulyo penyaluran dana melalui kas desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Merujuk pada pengertian di atas, desa Srimulyo dalam menyelenggarakan laporan keuangannya harus meninjau ulang secara teliti berdasarkan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam upaya menciptakan pemerataan kemampuan keuangan berdasarkan prinsip

akuntabilitas untuk mendanai kebutuhan desa Srimulyo dalam rangka menyelenggarakan program pemerintahan untuk pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di desa Srimulyo yakni pembangunan jalan desa utama Srimulyo.

Akuntabilitas penggunaan dana desa dengan studi kasus pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul pada indikator keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo, pemerintah desa Srimulyo diketahui telah menjalankan sistem akuntabilitas melalui penggunaan APBDes yang disesuaikan dengan keputusan pembangunan jalan desa dalam menunjang keperluan industri pangan dan wisata di desa Srimulyo melalui penggunaan dana desa untuk belanja barang dan jasa.

Akuntabilitas penggunaan dana desa Srimulyo pada indikator sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo diketahui bahwa pemerintah desa Srimulyo telah menjalankan sistem akuntabilitas melalui penyusunan APBDes pada periode 2017 dengan proses sosialisasi pada masyarakat desa Srimulyo dalam menentukan besaran biaya pembangunan jalan desa dan diputuskan bahwa dana APBDes diserahkan pada Tim Pengelola Kegiatan dari perangkat desa Srimulyo serta diketuai oleh Bapak Supriyanto selaku dukuh setempat dengan pelaksanaan pembangunan jalan desa berdasarkan prinsip swakelola berupa gotong royong antar masyarakat desa Srimulyo.

Akuntabilitas yang terkait dengan indikator penggunaan dana pembangunan jalan desa, pemerintah desa Srimulyo telah menjalankan sistem akuntabilitas melalui kegiatan administrasi pembelian barang yakni material

atau bahan bangunan jalan desa serta jasa yakni sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan jalan desa selanjutnya dilakukan penyusunan laporan keuangan tentang anggaran pembangunan jalan desa Srimulyo. Namun pada realisasi indikator rincian laporan dana pembangunan jalan desa, pemerintah desa Srimulyo belum sepenuhnya menjalankan sistem akuntabilitas yakni monitoring atau pengawasan kinerja kepada Tim Pengelola Kegiatan yang diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan rincian dana pembangunan desa dari APBDes untuk pembangunan jalan desa Srimulyo pada keperluan operasional pembelian barang dan jasa yang belum maksimal. Hal ini karena jumlah tim penanggung jawab pemeriksa keuangan dari pemerintah desa masih kurang. Di satu sisi, kemampuan akuntansi yang belum memadai dalam proses penghitungan kasar hingga akumulasi dana total dari tiap pelaksanaan pembiayaan barang dan jasa dari karyawan kantor desa Srimulyo.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga merupakan realisasi dari pemerintah desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya terkait dengan program pembangunan desa yang tidak terlepas dari perannya dalam menyelenggarakan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tentang pembangunan dana desa Srimulyo melalui pengelolaan alokasi dana desa dimana alokasi dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 10 yang berbunyi “*Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa*”, pemerintahdesa Srimulyo dalam menyelenggarakan laporan keuangannya telah meninjau ulang secara teliti berdasarkan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam upaya menciptakan pemerataan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan desa Srimulyo dalam rangka menyelenggarakan program pemerintahan untuk pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di desa Srimulyo.

Pemerintah desa Srimulyo dalam menyelenggarakan program alokasi dana desa diketahui belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya dimana akuntabilitas tersebut juga merupakan salah satu upaya dalam penegakan prinsip keterbukaan mengenai segala aktivitas yang dikerjakan oleh pemerintah desa Srimulyo terhadap masyarakat desa Srimulyo. Prinsip akuntabilitas dari pemerintah Desa Srimulyo tersebut juga diketahui telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa Srimulyo sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Srimulyo.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 yang memuat uraian tentang bidang pelaksanaan pembangunan desa yang salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran yang diterima oleh kelurahan Srimulyo untuk desa Srimulyo sebagai perpanjangan tangan program administrasi desa yang berasal dari pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebanyak Rp. 642.214.750,00. Jumlah dana tersebut telah dapat direalisasikan secara cepat oleh pemerintah desa Srimulyo dalam penggunaan alokasi dana meliputi belanja barang dan jasa pada unsur belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman untuk rapat serta honorarium tim panitia dan belanja modal pengadaan jalan desa dimana terdapat kesinergisan dengan jumlah biaya awal atau biaya modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan dana untuk program pembangunan jalan desa telah diterapkan secara optimal sehingga prinsip akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut telah diuji, dievaluasi serta dievaluasi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal yang menyatakan tentang ketentuan penggunaan alokasi dana pembangunan desa yang dalam hal ini adalah alokasi dana untuk pembangunan jalan desa. Unsur ketidaklayakan jalan desa yang ditemui oleh peneliti yang terletak pada kondisi fisik jalan desa sehingga kurang sesuai dengan fungsi utamanya sebagai jalan untuk arus lalu lintas aktivitas sehari-hari warga masyarakat desa Srimulyo telah kembali difungsikan secara normal dengan pembangunan jalan desa Srimulyo.

Kondisi fisik jalan desa yang ditemui oleh peneliti sebelumnya yakni beresiko tinggi terjadinya kelongsoran pada saat musim hujan karena pondasi jalan yang masih belum menggunakan teknik pembuatan jalan sesuai dengan standar arsitektur kini telah dibangun pondasi jalan utama sebagai alur transportasi dengan menggunakan sistem beton dalam menyangga besaran muatan para pengguna jalan dengan menggunakan segala material bangunan yang telah dianggarkan semula dari APBDes sehingga kualitas pondasi jalan tersebut dapat digunakan dalam beraktivitas atau kegiatan para pengguna jalan dan mencegah kelongsoran terutama pada musim hujan.

Kondisi jalan desa Srimulyo juga diketahui telah memenuhi standar keamanan karena batas jalan desa tersebut mulai difasilitasi dengan alat pembatas jalan sebagai upaya keamanan para pengguna jalan dalam mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat berkendara mengingat sebelumnya terdapat beberapa dataran rendah atau jurang di samping kanan atau kiri jalan desa tersebut. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah desa Srimulyo diketahui telah melaksanakan kinerjanya dalam upaya pembangunan jalan desa secara optimal terkait dengan pelaksanaan alokasi dana desa untuk program pembangunan jalan desa.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penyelenggaraan sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Srimulyo terhadap masyarakat desa Srimulyo berdasarkan

APBDes 2017. Berdasarkan prinsip kebijakan publik, pemerintah desa Srimulyo desa diketahui telah menjalankan suatu program yang dapat memberikan jalan keluar dari suatu permasalahan atau menanganinya dengan tepat dimana pemerintah pusat yang diketahui telah memberikan dana desa kepada desa kemudian perangkat desa untuk membuat program pembangunan jalan desa di desa Srimulyo dalam mengatasi jalan yang tidak layak untuk diperbaiki agar pengguna jalan merasa nyaman telah dilaksanakan dengan baik.

Pemerintah desa dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menerapkan kegiatan yaitu membangun jalan desa untuk kepentingan keselamatan serta kenyamanan dalam akses lalu lintas pedesaan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam rangka memperlancar pembangunan jalan desa Srimulyo.

Merujuk pada rincian laporan dana pembangunan jalan desa, berbagai uraian di atas, pemerintah desa dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan penyusunan laporan terkait dengan telah terealisasi atau belum terealisasinya program kerja pembangunan jalan desa Srimulyo sesuai dengan besaran bantuan desa yang diperoleh dari pemerintah kabupaten Bantul, Yogyakarta berdasarkan prinsip akuntabilitas laporan keuangan desa menurut undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, masyarakat diketahui telah dapat menilai dan mengetahui sejauh mana capaian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Srimulyo serta sejauh mana keberhasilan dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Srimulyo. Hal ini dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat desa Srimulyo terhadap pemerintah desa Srimulyo mengingat tingginya angka yang dianggarkan dari pusat sehingga pelaporan keuangan tersebut dapat terhindar dari adanya penyelewengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.

E. Analisis Pelaksanaan Laporan Keuangan APBDes Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Desa Srimulyo Pada Tahun Anggaran 2017, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Srimulyo memiliki pendapatan yang berasal dari desa Srimulyo sendiri sebesar Rp. 2.923.534.642,00 serta pendapatan transfer sebesar Rp. 3.117.739.260 dengan total jumlah pendapatan sebesar Rp. 6.041.273.902,00 dimana semua pendapatan tersebut digunakan oleh pemerintah desa Srimulyo untuk keperluan pembiayaan belanja barang dan jasa di desa Srimulyo pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta bidang tak terduga.

Berdasarkan Anggaran Belanja Desa Srimulyo pada tahun Anggaran 2017, dapat disimpulkan pemerintah desa Srimulyo memiliki anggaran belanja untuk keperluan pembiayaan belanja barang dan jasa pada bidang

penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 4.192.191.742,00 sedangkan pada pelaksanaan pembangunan desa dianggarkan biaya sebesar Rp. 1.107.467.450,00 kemudian pada bidang pembinaan kemasyarakatan dianggarkan biaya sebesar Rp. 680.638.302,00 dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 287.012.640,00 serta bidang tak terduga sebesar Rp. 68.335.660,00 dengan jumlah total sebesar Rp. 6.335.645.794,00 dimana program pembangunan jalan desa Srimulyo dalam menunjang keberadaan desa industri termasuk dalam anggaran belanja pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penyelenggaraan sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Srimulyo terhadap masyarakat desa Srimulyo berdasarkan APBDes 2017. Pemerintah desa Srimulyo dalam program alokasi dana desa diketahui belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya dimana akuntabilitas tersebut juga merupakan salah satu upaya dalam penegakan prinsip keterbukaan mengenai segala aktivitas yang dikerjakan oleh pemerintah desa Srimulyo terhadap masyarakat desa Srimulyo. Namun prinsip akuntabilitas dari pemerintah Desa Srimulyo diketahui telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa Srimulyo sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Srimulyo. Berdasarkan prinsip penggunaan keuangan

pemerintah desa, pemerintah desa Srimulyo dalam mengalokasikan dana bantuan desa untuk pembangunan jalan desa telah disampaikan secara transparan kepada masyarakat desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola laporan keuangan.

Namun pelaporan keuangan desa tersebut belum sepenuhnya didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi sehingga penyusunan laporan keuangan desa Srimulyo tersebut masih menggunakan format susunan laporan periode sebelumnya. Di satu sisi, pelaporan keuangan yang dibuat oleh perangkat desa tersebut juga belum berlandaskan pengetahuan mengenai cara menyusun laporan keuangan yang seharusnya diadakan beberapa pelatihan terkait dengan metode pembuatan laporan keuangan desa dengan harapan agar mendapatkan hasil laporan yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

Berdasarkan indikator tentang keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Srimulyo memutuskan untuk membangun jalan desa melalui proses penerapan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang disesuaikan dengan keputusan pembangunan jalan desa melalui penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan jalan desa Srimulyo dalam menunjang keperluan industri pangan dan wisata serta menjawab keinginan masyarakat desa Srimulyo untuk segera dilakukan perbaikan jalan sebagai kebutuhan transportasi sehari-hari dalam menunjang

kelangsungan pembangunan jalan desa untuk keperluan industri pangan dan wisata di desa Srimulyo selain juga menjawab keinginan masyarakat desa Srimulyo untuk segera dilakukan perbaikan jalan dalam memenuhi kebutuhan transportasi mereka sehari-hari dengan menggunakan prinsip swakelola yakni sistem gotong royong oleh seluruh warga masyarakat desa Srimulyo.

Berdasarkan indikator sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo, pemerintah desa Srimulyo diketahui telah menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah proses penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa pada periode 2017 dimana proses tersebut melalui upaya sosialisasi pada masyarakat desa Srimulyo untuk diikutsertakan juga dalam menentukan besaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan jalan desa Srimulyo di mana besaran biaya tersebut berdasarkan kebutuhan material barang dan jasa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo.

Proses penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo dimana dalam sosialisasi tersebut juga diputuskan bahwa dana yang diserahkan oleh pemerintah desa Srimulyo melalui APBDes diserahkan pada Tim Pengelola Kegiatan yang berasal dari perangkat desa Srimulyo dan diketuai oleh Bapak Supriyanto selaku dukuh setempat. Berdasarkan indikator penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo disimpulkan bahwa pemerintah desa Srimulyo dalam merealisasikan penggunaan dana pembangunan jalan desa telah menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah administrasi pelaksanaan pembelian barang yakni material atau bahan

bangunan jalan desa serta pembelian jasa yakni sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan jalan desa.

Pemerintah desa Srimulyo diketahui dalam menggunakan dana pembangunan jalan desa juga mendasarkan pada keputusan pengadministrasian pelaksanaan pembelian barang dan jasa tersebut didasarkan pada rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Srimulyo dimana dana pembangunan jalan desa tersebut diketahui berasal dari dana Anggaran Belanja Desa pemerintah pusat Republik Indonesia 2016 melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang kemudian dialokasikan ke pemerintah kabupaten Bantul melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya dialokasikan pada pemerintah desa melalui kepala urusan tata usaha dan umum desa Srimulyo melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Besaran dana tersebut diketahui digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi sebagai kepentingan keselamatan para pengguna jalan serta menunjang unsur industri sebagaimana yang diapresiasi oleh pemerintah pusat. Besaran dana tersebut disosialisasikan pada masyarakat desa Srimulyo sebagai dana belanja barang yakni berupa material pembangunan jalan desa Srimulyo dan dana belanja jasa yakni sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan jalan desa Srimulyo yang selanjutnya dilakukan penyusunan laporan keuangan tentang anggaran pembangunan jalan desa Srimulyo tahun 2017 oleh sekretaris desa Srimulyo yang disahkan oleh tata usaha dan umum desa Srimulyo.

Pada indikator laporan rincian dana pembangunan jalan desa Srimulyo, pemerintah desa Srimulyo belum sepenuhnya menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah monitoring kinerja tim pengalokasian dana yakni penyerahan dana APBDes untuk pembangunan jalan desa Srimulyo pada beberapa pelaksana pembangunan jalan desa Srimulyo untuk keperluan operasional barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa Srimulyo diketahui masih belum bisa melakukan pemantauan secara rinci mengenai besaran biaya yang dikeluarkan untuk pembelanjaan barang dan jasa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo hingga pembangunan jalan desa Srimulyo yang dikerjakan saat ini berupa pembangunan konstruksi penguatan pondasi jalan desa.

Pemerintah desa Srimulyo mengaku mengalami kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan pengeluaran anggaran secara rinci yang dikarenakan jumlah tim penanggung jawab operasional pembiayaan dana pembangunan masih kurang dan ditunjang dengan kemampuan yang belum memadai dalam proses penghitungan kasar hingga akumulasi dana total dari tiap pelaksanaan pembiayaan barang dan jasa. Berdasarkan uraian tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Srimulyo pada unsur keputusan pembangunan jalan desa, sosialisasi pembangunan jalan desa, penggunaan dana pembangunan jalan desa. Sedangkan pemerintah desa

Srimulyo diketahui belum sepenuhnya mampu menyusun rincian laporan dana pembangunan jalan desa.

Hal ini berarti bahwa sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Srimulyo pada unsur keputusan pembangunan jalan desa, sosialisasi pembangunan jalan desa, penggunaan dana pembangunan jalan desa telah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta mewujudkan masyarakat kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

Hal ini dilandasi oleh filosofis visi yakni cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Kemanusiaan itu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi dan visi tersebut juga merupakan upaya dalam membangun jalan desa Srimulyo berdasarkan prinsip akuntabilitas melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur, mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana serta perencanaan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Penerapan sistem akuntabilitas oleh pemerintah desa Srimulyo dalam sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Srimulyo pada unsur keputusan pembangunan jalan desa, sosialisasi pembangunan jalan desa, penggunaan dana pembangunan jalan desa juga telah sesuai dengan visi Kantor Desa Srimulyo Piyungan, Bantul Yogyakarta yakni menciptakan masyarakat Desa Srimulyo sejahtera yang berbasis pada budaya nusantara.

Penerapan sistem akuntabilitas oleh pemerintah desa Srimulyo dalam sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa

Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Srimulyo pada unsur keputusan pembangunan jalan desa, sosialisasi pembangunan jalan desa, penggunaan dana pembangunan jalan desa juga telah sesuai dengan misi Kantor Desa Srimulyo Piyungan, Bantul Yogyakarta yakni menciptakan masyarakat Desa Srimulyo sejahtera yang berbasis pada budaya nusantara. yakni menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata, menjadikan Desa Srimulyo sebagai Desa Terpadu pengembangan kawasan industri dan Desa Wisata.

Sedangkan penerapan sistem akuntabilitas oleh pemerintah desa Srimulyo dalam sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Srimulyo sesuai dengan misinya yaitu mewujudkan kemandirian pemerintah Desa, BPD, LKD, dan masyarakat Desa Srimulyo. mewujudkan kemitraan yang harmonis dan kondusif antar lembaga-lembaga di Desa Srimulyo. Memantapkan sumber pendapatan, kekayaan, dan keuangan Desa Srimulyo.

Di satu sisi, pemerintah desa Srimulyo juga mewujudkan aspek akuntabilitas dari APBDes yakni berupa misi dari terwujud demokratisasi, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dengan berlandaskan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal membangun kemitraan global dengan lembaga dan instansi lain demi kemajuan pembangunan wilayah Desa Srimulyo memberdayakan potensi dan

sumber daya Desa Srimulyo secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan ketakwaan dan kerukunan hidup beragama serta menumbuhkan budi pekerti yang berkepribadian Bangsa Indonesia.